



**Laporan Keuangan Tahunan
2024 (an-audited)
Per 31 Desember 2024**

**Balai Besar Perikanan
Budi Daya Laut Lampung**

Jalan Yos Sudarso Desa Hanura, Teluk Pandan Pesawaran, 35454

Laman:www.bbpbldjpb.kkp.gp.id / E-mail:bbpbl.lampung@gmail.com Telepon (0721) 4001379

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, Desember 2024
Kepala BBPBL Lampung,



Mulyanto, ST, M.Si
NIP197406122005021002

DAFTAR ISI
TAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

Jl. YOS SUDARSO HANURA, PESAWARAN, LAMPUNG
TELEPON 0721 4001379, 4001380 FAXIMILE 0721 4001110

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan (*an-audited*) TA 2024 Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, Desember 2024

Kepala BBPBL Lampung



Mulyanto, ST, M.Si
NIP197406122005021002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan (an-audited) Tahunan TA 2024 Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.320.350.650,- atau mencapai 111,02 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.189.308.000,-

Realisasi Belanja Negara pada akhir periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.413.962.746,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp33.489.411.000,- .

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp46.372.452.137,-; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.778.346.192,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp43.978.808.197,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp615.297.748,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp233.814.569,- dan Rp46.138.637.568,- Jadi jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp46.372.452.137,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari Operasi, surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.258.218.534,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp40.004.352.455,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp38.746.133.921,-) . Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp2.628.557.245,- dan surplus sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp36.117.576.676,-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp49.405.625.350,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp36.117.576.676,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp765.385.798,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp32.085.203.096,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp,-.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT
LAMPUNG
NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PNB	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	1.778.346.192	2.580.617.390
Jumlah Aset Lancar		1.778.346.192	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	11.050.462.500	11.050.462.500
Peralatan dan Mesin	C.15	70.222.488.617	70.968.242.932
Gedung dan Bangunan	C.16	32.329.501.867	32.144.415.231
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	3.554.698.928	3.357.755.872
Aset Tetap Lainnya	C.18	107.366.000	107.366.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	67.166.150
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(71.477.394.562)	(71.193.013.314)
Jumlah Aset Tetap		45.787.123.350	46.502.395.371
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	3.577.563.729	2.867.453.680
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(2.885.354.530)	(2.367.474.453)
Jumlah Aset Lainnya		615.297.748	499.979.227
JUMLAH ASET		48.372.452.14	49.582.991.988
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	233.814.569	177.366.638
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		233.814.569	177.366.638
JUMLAH KEWAJIBAN		233.814.569	177.366.638
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	46.138.637.568	49.405.625.350
JUMLAH EKUITAS		46.138.637.568	49.405.625.350
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		46.372.452.137	49.582.991.988

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.258.218.534	1.483.137.436
JUMLAH PENDAPATAN		1.258.218.534	1.483.137.436
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12.856.850.444	11.037.560.004
Beban Persediaan	D.3	4.118.995.517	2.619.438.825
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.442.943.945	6.571.050.668
Beban Pemeliharaan	D.5	2.378.062.942	2.077.656.342
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.526.892.421	1.932.079.697
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	8.665.100.798	14.500.167.024
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.015.506.388	4.483.889.806
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		40.004.352.455	43.221.842.366
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(38.746.133.921)	(41.738.704.930)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		25.103.000	40.756.178)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		5.670.528.699	19.634.683.883
Defisit Selisih Kurs		(5.645.425.699)	19.593.927.705)
Pendapatan dari Keg Non Operasional Lainnya		8.273.982.944	14.247.144.098
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL		-	-
Penerimaan kembali belanja barang TAYL		-	-
Pendapatan perolehan aset lainnya		-	-
Pendapatan penyelesaian Nilai persediaan		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.628.557.245	19.890.377.018)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		-36.117.576.676	41.812.413.017
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.12	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(36.117.576.676)	41.812.413.017

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	49.405.625.350	52.793.768.090
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-36.117.576.676	-41.812.413.017
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	765.385.798	477.579.586
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
Transfer Masuk	E.3.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.7	765;385.798	477.579.586
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.8	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	32.085.203.096	38.901.849.863
EKUITAS AKHIR	E.5	48.138.637.568	49.405.625.350

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pengembangan budidaya laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut.

Fungsi

- ❖ Identifikasi dan perumusan program pengembangan teknik budidaya laut,
- ❖ Pengujian standar perbenihan dan pembudidayaan ikan laut,
- ❖ Pengujian alat, mesin dan teknik perbenihan serta pembudidayaan ikan laut,
- ❖ Pelaksanaan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan laut,
- ❖ Pelaksanaan sertifikasi mutu dan sertifikasi personil perbenihan dan pembudidayaan ikan laut,
- ❖ Pelaksanaan produksi dan pengelolaan induk penjenis dan induk dasar ikan laut,
- ❖ Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan laut serta pengendalian hama dan penyakit ikan laut,
- ❖ Pengembangan teknik dan pengujian standar pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk dan benih ikan laut,
- ❖ Pengelolaan system jaringan laboratorium penguji dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan laut,
- ❖ Pengembangan dan pengelolaan system informasi dan publikasi pembudidayaan ikan laut,
- ❖ Pengelolaan keanekaragaman hayati,

- ❖ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditugaskan BBPBL telah menetapkan visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagai sebagai Penghasil Induk dan Benih Unggul, serta Teknologi Budidaya Laut Adaptif Terbesar di Indonesia.

Misi

1. Memproduksi Induk dan Benih Unggul Ikan Laut
2. Melaksanakan Penerapan Teknologi Budidaya Laut
3. Memproduksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan
4. Melaksanakan Pelayanan Laboratorium Uji
5. Melakukan Diseminasi Induk dan Benih Ikan Laut Unggul serta Teknologi Budidaya Laut.

Tujuan

Pengembangan teknologi budidaya adaptif

- ❖ Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perairan budidaya
- ❖ Mendukung pengembangan kawasan budidaya laut di daerah binaan
- ❖ Penyediaan benih dan calon induk ikan laut unggul
- ❖ Penyediaan pakan hidup dalam rangka mendukung pengembangan budidaya laut
- ❖ Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan, visualisasi dan sertifikasi

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi

Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- ⇒ Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- ⇒ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- ⇒ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ⇒ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ⇒ Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Jumlah pegawai Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 139 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 70 orang, 11 Orang PPPK , Tenaga Kontrak (PPNPM) sebanyak 14 orang, dan tenaga PJLP sebanyak 44 orang .

2. Sumber daya pembiayaan Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung berasal dari DIPA Pagu Anggaran dengan Nomor SP DIPA-032.04.2.427706/2024 tanggal 24 November 2023, yang terdiri dari :
 - a. Rupiah Murni (RM)
 - b. PNPB (PNP)
 - Dengan anggaran awal untuk Rupiah Murni sebesar Rp33.592.996.000,0 dan untuk anggaran PNPB sebesar Rp930.010.000,0

3. Selama periode berjalan, Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu :
 - Revisi Ke I tanggal tanggal 25 Januari 2024 yaitu revisi POK dengan nilai pagu yang masih sama dengan pagu anggaran awal ;
 - Revisi II (kedua) yaitu tanggal 21 Februari 2024 yaitu revisi POK dengan anggaran yang masih sama dengan revisi sebelumnya ;
 - Revisi DIPA ke III (ketiga) yaitu tanggal 04 Maret 2024 dengan anggaran yang telah direvisi menjadi Rp33.818.006.000,- ,
 - Revisi ke IV (keempat) yaitu tanggal 23 April 2024 yaitu revisi POK dengan nilai pagu yang sama dengan revisi ke III ;
 - Revisi ke V (kelima) tanggal 02 Mei 2024 yaitu revisi buka blokir / revisi POK dengan nilai pagu sama dengan revisi ke IV ;
 - Revisi ke VI (keenam) yaitu revisi POK tanggal 05 Juni 2024 dengan nilai Pagu menjadi masih sama dengan revisi sebelumnya
 - Revisi ke VII (ketujuh) yaitu revisi revisi POK tanggal 15 Juli 2024 dengan nilai Pagu masih sama dengan revisi sebelumnya.

- Revisi ke VIII (delapan) yaitu revisi DIPA Kanwil tanggal 02 Agustus 2024 dengan nilai Pagu anggaran yang berubah menjadi sebesar Rp33.489.411.000,0
 - Revisi ke IX (Sembilan) yaitu revisi POK tanggal 14 Oktober 2024 dengan nilai pagu yang sama dengan sebelumnya.
 - Revisi ke X (sepuluh) yaitu revisi POK tanggal 19 November 2024 dengan nilai pagu yang masih sama dengan sebelumnya.
 - Revisi ke XI (sebelas) yaitu revisi POK tanggal 25 November 2024 dengan nilai pagu yang masih sama dengan sebelumnya.
 - Revisi ke XII (dua belas) yaitu revisi POK tanggal 09 Desember 2024 dengan nilai pagu yang masih sama dengan sebelumnya.
 - Revisi ke XIII (tiga belas) yaitu revisi POK tanggal 12 Desember 2024 dengan nilai pagu yang masih sama dengan sebelumnya.
4. Pada Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung terdapat program Nasional (PN) sebesar Rp22.029.912.000,- yang terdiri dari :
- a. Program pengelolaan perikanan dan kelautan,-
 - Bibit rumput laut dan kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat sebanyak 4.000 unit senilai Rp152.000.000,-
 - Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat sebanyak 10 paket senilai Rp550.000.000,-
 - Calon induk unggul ikan laut yang di salurkan ke masyarakat sebanyak 32.000 ekor senilai 9.810.000.000
 - Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat senilai Rp3.674.016.000,-
 - b. Sarana Bidang kemaritiman , kelautan dan perikanan
 - Calon induk unggul yang di produksi senilai Rp1.150.481.000,-
 - c. Penyidikan dan Pengujian Penyakit
 - Sampel surveilen resistensi antimikroba yang di uji senilai Rp52.383.000,-
 - Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang di sediakan senilai Rp100.000.000,-
 - Sarana produksi usaha yang disalurkan ke Masyarakat senilai Rp5.745.000.000,-
 - Pakan ikan yang di produksi untuk operasional UPT senilai Rp796.032.000,-

Rincian anggaran pada periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pend Penjualan Hasil Perikanan	1.189.308.000	1.189.308.000
Jumlah Pendapatan	1.189.308.000	1.189.308.000
Belanja		
Belanja Pegawai	13.324.080.000	12.825.430.000
Belanja Barang	20.041.840.000	19.556.239.000
Belanja Modal	1.157.742.000	1.107.742.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	34.523.662.000	33.489.411.000

Realisasi

Pendapatan

Rp1.320.350.650,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.320.350.650,- atau mencapai 111.02 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.189.308.000. Pendapatan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung terdiri dari sbb:

- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (MAP 425112)
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (MAP 425131)
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi (MAP 425151)
- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya (MAP 425289)
- Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129)
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TYL (425911)
- Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913)

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pend Penj Hsl Perternakan & Budidaya	944.478.000	956.068.600	101,23
Pend.Pemindahtanganan BMN		25.103.000	
Pend Sewa Tanah Gdg & Bangunan	-	45.400.934	-
Pend Pengg Sarana & Prasarana Tusi	130.940.000	76.100.000	58,12
Pend Pengujian, Sertefikasi & Stand	113.890.000	180.649.000	158,62
Penerimaan Kemb B barang TAYL		17.115.145	-
Pengembnalian belanja modal TAYL	-	-	-
Penerimaan Kemb B Pegawai TAYL	-	19.913.971	-
Jumlah	1.189.308.000	1.320.350.650	111,02

Realisasi Pendapatan dari Penjualan Hasil Perikanan periode 31 Desember TA 2024 mengalami kenaikan sebesar persen dibandingkan periode yang sama TA 2023.

1. Pendapatan penjualan hasil peternakan, perikanan mengalami penurunan sebesar 14,74 persen dibandingkan TA 2024 dikarenakan tidak banyak benih yang dihasilkan pada tahun anggaran 2024 ini.
2. Pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan juga mengalami penurunan sebesar -6,51 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya beberapa pegawai yang sudah tidak menempati rumah dinas lagi dikarenakan beberapa pegawai sudah pindah.
3. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana Tusi mengalami penurunan sebesar 51,56 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun ini tidak banyak anak PKL yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di BBPBL Lampung.
4. Pendapatan pengujian sertifikasi dan stadarisasi mengalami kenaikan sebesar 15,76 % , hal ini dikarenakan adanya penambahan kenaikan jumlah sampel yang masuk.

Laporan Keuangan Tahunan (an-audited) Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung TA 2024

5. Terdapat pendapatan pemindahtanganan BMN senilai Rp25.103.000,- yaitu berupa penjualan kendaraan roda 4 berupa Mobil Toyota Kijang Grand Long dan 2 unit kendaraan roda 3 merk Viar.
6. Pada semester II Tahun 2024 terdapat penerimaan kembali belanja Pegawai senilai Rp9.913.905,- yaitu berupa pengembalian tukin dan pengembalian belanja uang lembur pegawai tahun 2023.
7. Pada Semester II tahun 2024 terdapat pengembalian kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pend Penj Hasil Peternakan , pertanian	956.068.600	1.121.415.800	-14,74
Pend Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	45.400.934	48.562.636	-6,51
Pend Pengg Sarana & Prasarana Tusi	76.100.000	157.100.000	-51,56
Pend Pengujian, Sertifikasi & Standarisasi	180.649.000	156.059.000	15,76
Pend.penjualan peralatan dan mesin	-	-	#DIV/0!
Pendapatan pemindahtanganan BMN	25.103.000	40.756.178	-38,41
Pend.denda keterlambatan		-	
Penerimaan Kemb B Pegawai TAYL	19.913.971	6.911.888	188,11
Penerimaan Kemb B Barang TAYL	17.115.145	-	#DIV/0!
Penerimaan Kemb B Modal TAYL	-	Rp 2.604.056	0,00
Jumlah	1.320.350.650	1.533.409.558	86,106

Realisasi Belanja
Negara
Rp33.413.962.746,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Satker BBPBL Lampung pada periode per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.413.962.746,- atau 100 % dari anggaran belanja sebesar Rp33.489.411.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Tahunan (an-audited) Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung TA 2024

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12.825.430.000	12.825.114.444	100,00
Belanja Barang	19.556.239.000	19.481.663.826	99,79
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	1.107.742.000	1.107.184.476	99,95
Total Belanja Kotor	33.489.411.000	33.447.463.836	99,87
Pengembalian Belanja	0	33.501.090	
JUMLAH	33.489.411.000	33.413.962.746	99,87

Realisasi Belanja pada periode Semester II TA 2024 mengalami penurunan sebesar 17,37 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA. 2023. Hal ini dikarenakan karena anggaran pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan BBPBL Lampung mengalami pemblokiran anggaran yang berpengaruh pada penyerapan realisasi anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12.825.114.444	11.018.936.004	16,39
Belanja Barang	19.481.663.826	28.361.090.417	(31,31)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal	1.107.184.476	1.056.933.000	4,75
Jumlah	33.413.962.746	40.436.959.421	(17,37)

Belanja Pegawai
Rp12.825.114.444,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada periode Semester II per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.825.114.444,- dan Rp11.018.936.004,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh

Laporan Keuangan Tahunan (an-audited) Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung TA 2024

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Pegawai Semester II TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,39 persen dari TA 2023, hal ini disebabkan karena adanya penambahan tenaga PPPK dari 2 orang menjadi 9 dengan total 11 orang pegawai yang mengakibatkan bertambahnya jumlah anggaran belanja pegawai dan bertambahnya realisasi belanja pegawai pada Semester II Tahun 2024 ini.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.825.114.534	11.018.936.004	16,39
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	12.825.114.534	11.018.936.004	16,39
Pengembalian Belanja Pegawai	90	1.200.000	-
Jumlah Belanja	12.825.114.444	11.017.736.004	16,40

Belanja Barang
Rp19.481.663.826,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada periode Semester II per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.481.663.826,- dan Rp28.361.090.417,-. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 31,31 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023, hal ini disebabkan karena adanya penurunan anggaran belanja barang (52) pada tahun anggaran 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang berpengaruh pada realisasi belanja barang dan juga terdapat pengembalian belanja barang senilai Rp33.501.000,- yaitu berupa :

- Pengembalian belanja keperluan perkantoran berupa honor PPNP untuk 2 orang senilai Rp2.366.000,-
- Pengembalian belanja penambah daya tahan tubuh senilai Rp28.955.000,-
- Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas biasa senilai Rp2.180.000,0

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.034.319.035	2.614.163.030	#REF!
Belanja Barang Non Operasional	1.762.255.910	1.685.409.088	#REF!
Belanja Barang Persediaan	3.626.426.449	5.227.585.000	#REF!
Belanja Jasa	2.652.978.069	2.241.153.836	#REF!
Belanja Pemeliharaan	2.378.062.942	2.257.817.112	#REF!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.529.072.421	1.932.079.697	#REF!
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	5.183.050.000	12.152.682.194	-
Bel Barang Lainnya untuk diserahkan kpd Masy.	349.000.000	250.200.460	-
Jumlah Belanja Kotor	19.515.164.826	28.361.090.417	(31,19)
Pengembalian Belanja	33.501.000	-	
Jumlah Belanja	19.481.663.826	28.361.090.417	(31,31)

Belanja Modal

Rp1.107.184.476,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode Semester II TA 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.107.184.476,- dan Rp1.056.433.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,80 persen dibandingkan Semester II TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Pengukuran dan pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.107.184.476	1.056.433.000	4,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja penambahan nilai Jalan dan Jembatan	0	0	
Belanja Modal perencanaan gedung dan bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.107.184.476	1.056.433.000	4,80

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp0,-

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Semester II TA 2024 sebesar Rp0,- dan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.107.184.476,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada periode semester II per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.107.184.476,-, mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2023 sebesar Rp1.056.433.000,- hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal yang naik dibandingkan dengan anggaran belanja modal tahun yang lalu.

Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2024 berupa peralatan penunjang laboratorium, alat-alat penunjang produksi perikanan berupa pompa air, dan peralatan penunjang perkantoran lainnya seperti, CCTV, LCD Projector, Mesin Antrian, dan AC Split.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	1.107.184.476	1.056.433.000	1,05
			0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.107.184.476	1.056.433.000	1,05
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.107.184.476	1.056.433.000	1,05

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada periode Semester II TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- . Tidak ada realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester II TA 2024 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2024	T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Semester II TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp,- dan Rp0,- Tidak ada realisasi Belanja Modal Jalan , Irigasi, dan Jaringan pada Semester II TA 2024 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	THN 2024	THN 2023	Naik (Turun) %
Bel Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal
Lainnya
Rp,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang tunai di brankas	-	-
Uang di rekening bank	-	-
Jumlah Kas	-	-
Saldo akhir BP Kas	-	-
Jumlah Kas	-	-
Selisih Kas	-	-
Saldo UP	-	-
Kwitansi UP	-	-
Jumlah UP	-	-
Saldo UP menurut UAKPA	-	-
Selisih pembukuan UP	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak
Rp,-

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP pada periode per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar TPA
Rp 0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-		#VALUE!
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-		#VALUE!
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-		#VALUE!
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		#VALUE!

Belanja Dibayar di Muka **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Rp 0

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Rp 0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan pada akhir periode per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.778.346.192,- dan Rp2.580.617.390,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Persediaan	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	866.685.426	1.347.831.186
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Hewan & Tanaman dijual/diserahkan kpd masy	622.672.150	698.105.550
aset lain-lain untuk diserahkan kpd masyarakat	-	-
Brg Persed Lainnya u/ dijual/disrhkan kpd masy/Pemda	31.356.000	186.100.131
Bahan Baku	67.182.472	68.665.842
Persediaan Lainnya	190.450.144	279.914.682
Jumlah	1.778.346.192	2.580.617.391

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Penjelasan terkait rincian barang persediaan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Barang konsumsi senilai Rp866.685.426,- berupa alat kantor lainnya dan pakan mandiri.
2. Hewan dan tanaman dijual / diserahkan kepada masyarakat senilai Rp622.672.150,- berupa ikan / benih ikan yang disalurkan untuk masyarakat dalam program bioflok.
3. Barang persediaan lainnya untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat senilai Rp31.356.000,- berupa pakan buatan mandiri.
4. Bahan baku senilai Rp67.182.472,- berupa bahan baku pakan dan obat-obatan.
5. Persediaan Lainnya senilai Rp190.450.144,- berupa obat-obatan laboratorium Perikanan.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

TPA
Rp 0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-	-	#VALUE!
Tagihan PA			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-	-	#VALUE!
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	#VALUE!

Tanah

Rp11.050.462.500,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung pada periode per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.050.462.500,- dan Rp11.050.462.500. Tidak ada mutasi atau penambahan nilai tanah pada akhir periode semester II Tahun 2024. Rincian mutasi tanah dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	11.050.462.500
Mutasi tambah:	
Pengurukan dan pematangan tanah	0
belanja modal tanah pembentuk fisik berupa pagar semi permanen	0
Mutasi kurang:	
KDP	0
Saldo per 31 Desember 2024	11.050.462.500

Penambahan nilai aset tanah tersebut berasal dari pengurukan dan pematangan tanah tambak untuk kegiatan Budidaya udang system Cluster atau dikenal dengan nama Milenail Shrimp Farm (MSF) yang berlokasi di Kawasan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan mobilisasi dan kegiatan keselamatan kerja , untuk kegiatan pekerjaan tanah dan Geosintetik yang merupakan kegiatan divisi pekerjaan tanah (timbunan dan galian tanah). Berdasarkan survei lapangan maka untuk perhitungan luasnya tanah galian yaitu pekerjaan tambah timbunan biasa dari sumber galian , timbunan biasa dari dari sumber galian volume awal 14,256,00 M3 sehingga volume total menjadi 15,736,00M3.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

1	4.732 m2	Way Muli, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung	751,505,000
2	59.000 m2	Jl. Yos Sudarso Hanura, Pesawaran, Lampung	8,947,144,000
3	96 m2	Jl. RE Marta Dinata Hanura, Pesawaran, Lampung	29,717,000
4	15.736.00M3	Jl. Yos Sudarso Hanura, Pesawaran, Lampung	91,082,000
Jumlah			9,819,448,000

Peralatan dan Mesin

Rp70.222.488.617,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin pada akhir periode per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp70.222.488.617,- dan Rp70.968.242.932,-. Mutasi tambah sebesar Rp1.924.749.935,- dan mutasi

kurang sebesar Rp.2.670.504.250,-

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembelian AC Split sebanyak 3 unit senilai Rp67.500.000,- berdasarkan nomor kontrak 544/PPK/BBPBL/EP.SP/424/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang terletak di ruang pelatihan dan lobby utama.
2. Pembelian alat pengolah data berupa laptop dengan merk Axioo sebanyak sebanyak 4 unit senilai Rp31.600.000,- dengan nomor kontrak 514/PPK/BBPBL/EP.SP/II/2024 tanggal 29 Februari 2024
3. Pembelian peralatan penunjang perkantoran berupa printer merk Epson sebanyak 5 unit dan 4 unit PC merk Axioo senilai Rp68.250.000,- dengan nomor kontrak 514/PPK/BBPBL/EP.SP/II/2024 tanggal 29 Februari 2024
4. Pembelian 3 unit pompa air merk Ebara Bronze senilai Rp178.573.282,- dengan nomor kontrak 782/PPK/BBPBL/EP.SP/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
5. Pembelian peralatan penunjang operasional perikanan berupa summersible pump, red blower , motor penarik speed boat, dan penyemprot mesin senilai Rp127.425.780,- dengan nomor kontrak 1632/PPK/BBPBL/PL.424/VI/2024
6. Pembelian 1 unit kendaraan operasional perkantoran berupa Mini Bus merk Toyota Innova Zenix Putih senilai Rp382.719.640,- dengan nomor kontrak 3060/PPK/BBPBL/PL.3010/X/2024 dengan rekanan PT Astra Internasional Tbk.

Mutasi transaksi terhadap peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	70.968.242.932
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.107.184.476
Trasfer Masuk	0
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	817.565.459
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	2.670.504.250
Transfer keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	70.222.488.617
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-62.086.937.355
Nilai Buku per 31 Desember 2024	8.135.551.262

Gedung dan Bangunan
Rp32.329.501.867,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp32.329.501.867,- dan Rp32.144.425.231,- terdapat mutasi tambah pada periode Semester II tahun ini, senilai Rp,- yang berasal dari rehab bangunan Gedung parkir senilai Rp49.950.000,- sebanyak 1 unit,- dan rehab pekerjaan bangunan auditorium dan pemeliharaan Guest House 1 paket senilai Rp804.122.963,-.

Mutasi kurang tersebut berasal dari reklasifikasi keluar berupa perbaikan prasarana modul kerapu senilai Rp4.619.500,- ; Pekerjaan pemeliharaan instalasi Way Muli dan Guest House senilai Rp.6.698.845,- ; Perbaikan pekerjaan Auditorium senilai Rp.5.796.800,- ; reklasifikasi menjadi bangunan dan Gedung (asrama) senilai Rp90.640.000,- ; reklasifikasi menjadi bangunan dan Gedung (Gudang dan guest house) senilai Rp436.566.182,- ; bangunan rusak berat dan sudah di henti guna senilai Rp124.665.000,- berupa rumah pompa dan blower.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	32.144.415.231
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	854.072.963
Pengembangan melalui KDP	-
Rehabilitasi auditorium	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	668.986.327
Koreksi perubahan (kekurangan volume)	
Saldo per 31 Desember 2024	32.329.501.867
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-7.835.530.444
Nilai Buku per 31 Desember 2024	24.493.971.423

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp3.554.698.928,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.554.698.928,- dan Rp3.357.755.872,-. Terdapat penambahan nilai Jalan, Irigasi, Jembatan dan jaringan sampai dengan Semester II tahun ini sebesar Rp199.300.056,- yang berasal dari perbaikan jalan khusus kompleks seluas 1481 M2 , dengan SPK

nomor 3130/PPK/BBPBL/PL.424/XI/2023 tanggal 06 November 2023 dengan rekanan CV.Elang Putra Cakra Buana.

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	3.357.755.872
Mutasi tambah:	
Pengembangan nilai aset	199.300.056
Penyelesaian pembangunan dengan KDP	-
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	2.357.000
Saldo per 31 Desember 2024	3.554.698.928
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.554.926.763,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.999.772.165

Aset Tetap Lainnya
Rp107.366.000,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp107.366.000 dan Rp107.366.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode Semester II Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	107,366,000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	107,366,000
-	0
Nilai Buku per 3 Desember 2023	107,366,000

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp67.166.150,-. Tidak terdapat nilai konstruksi dalam pengerjaan pada Semester II tahun ini.

Akumulasi Penyusutan
set Tetap
(Rp71.477.394.562)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp71.477.394.562,-) dan (Rp71.193.013.314,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	70.222.488.617	62.086.937.355	8.135.551.262
2	Gedung dan Bangunan	32.329.501.867	7.835.530.444	24.493.971.423
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.554.698.928	1.554.926.763	1.999.772.165
4	Aset tetap yang tidak digunakan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		106.106.689.412	71.477.394.562	34.629.294.850

Aset Tak Berwujud
Rp 0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain
Rp3.577.563.729,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain pada periode per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp3.577.563.729,- dan Rp2.867.453.680,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung telah mengajukan Penetapan Status Aset ke Unit Eselon I sebagai syarat usulan penghapusan aset yang dihentikan dari penggunaannya. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.867.453.680
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.673.156.250
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	963.046.201
Saldo per 31 Desember 2024	3.577.563.729
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.885.354.530)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	692.209.199

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari hasil penghentian penggunaan BMN yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp155.138.250,- berupa 15 buah Printer dan 10 buah komputer (Peralatan Personal Komputer).
- Instalasi pengaman sebanyak 1 unit senilai Rp2.357.000,-
- Penambahan dari hasil penghentian penggunaan BMN yaitu berupa 32 unit AC split senilai Rp133.238.000,-
- Penambahan dari penghentian penggunaan BMN berupa Pressure sterilizer sebanyak 1 unit senilai Rp150.535.000,-
- Keramba Jaring Apung sebanyak 14 buah senilai Rp1.237.700.000,-
- Jaring angkat lainnya sebanyak 39 buah senilai Rp101.500.000,-
- Bangunan tempat kerja senilai Rp124.665.000,-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp2.885.354.530,-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp2.885.354.530,- dan Rp2.367.474.453,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	3.577.563.729	2.885.354.530	692.209.199
Jumlah	3.577.563.729	2.885.354.530	692.209.199

Amortasi Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa Nihil.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp233.814.569,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Saldo Utang kepada Pihak Ketiga pada periode per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp233.814.569,- dan Rp Rp177.366.638,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada periode Semester II TA 2024 ini Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung memiliki 2 rincian utang kepada pihak ketiga yaitu tagihan listrik PLN bulan Desember 2024 sebesar Rp182.254.569,- dan belanja pegawai yang masih harus di bayar berupa uang makan PNS dan PPPK bulan Desember 2024 sebesar Rp51.560.000,-

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada pihak ketiga	182.254.569	Tagihan listrik PLN bulan Desember 2024
Utang kepada pihak ketiga	51.560.000	Uang Makan PNS dan PPPK bulan Desember 2023
Jumlah	233.814.569	

Pendapatan Diterima di Muka
Rp 0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Beban yang Masih Harus Dibayar
Rp233.814.569,-

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp233.814.569,- dan Rp177.366.638,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	233.814.569	177.366.638
Jumlah	233.814.569	177.366.638

Ekuitas
Rp 46.372.452.137,-

C.26 Ekuitas

Ekuitas pada akhir periode per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46.372.452.137,- dan Rp49.582.991.988,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp1.258.218.534,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp1.258.218.534,- dan Rp1.483.137.436,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember
2024 dan 2023*

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pend Penj Hasil Peternakan & Budidaya	956.068.600	1.121.415.800	-14,74
Pend Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	45.400.934	48.562.636	-6,51
Pend Pengg Sarana & Prasarana Tusi	76.100.000	157.100.000	-51,56
Pend Pengujian, Sertifikasi & Standarisasi	180.649.000	156.059.000	15,76
Jumlah	1.258.218.534	1.483.137.436	(15,17)

Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya merupakan Pendapan-LO yang diperoleh dari produksi benih dan hasil budidaya. Adapun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari hasil sewa rumah dinas. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi merupakan Pendapan-LO yang diperoleh dari sewa asrama/guest house. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari jasa kegiatan di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Kenaikan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak disebabkan adanya kenaikan pada pendapatan penjualan peikanan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana Tusi , kenaikan jumlah dalam pendapatan pengujian, sertifikasi serta adanya pendapatan dari denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Beban Pegawai
Rp12.856.850.444,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.856.850.444,- dan Rp11.037.560.004,- . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.221.463.400	4.001.962.460	5,48
Pengembalian beban Pembulatan Gaji PNS	-90	0	#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PNS	53.600	49.740	
Beban Tunjangan Suami/Isteri PNS	355.153.510	337.873.956	5,11
Beban Tunjangan Anak PNS	100.382.242	97.437.228	3,02
Pengembalian beban Tunj.Struktural PNS	0	0	
Beban Tunjangan Struktural PNS	55.090.000	66.910.000	(17,67)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	269.080.000	297.730.000	(9,62)
Pengembalian beban Tunj.Fungsional PNS	0	-1.200.000	(100,00)
Beban Tunjangan PPh PNS	50.212.266	19.299.023	160,18
Beban Tunjangan Beras PNS	224.936.520	236.016.780	(4,69)
Beban Tunjangan Uang Makan PNS	569.123.000	571.149.000	(0,35)
Beban Gaji pokok PPPK	400.126.600	14.832.500	2.597,63
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6.869	280	2.353,21
Beban Gaji tunjangan Fungsional PPPK	12.760.000	2.700.000	372,59
Beban uang makan PPPK	70.316.000	3.367.000	1.988,39
Beban Tunjangan beras PPPK	17.815.320	362.100	4.820,00
Beban Tunjangan Suami/Isteri PPPK	13.302.480		
Beban Tunjangan Anak PPPK	3.429.360		
Beban Uang Lembur	47.121.000	68.086.000	(30,79)
Beban Tunjangan Umum PNS	50.165.000	56.720.000	(11,56)
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	5.875.903.497	5.241.058.429	12,11
Pengembalian beban tunjangan fungsional pegawai	0	0	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan) PPPK	520.409.870	23.205.508	2.142,61
Pengembalian beban tunjangan fungsional pegawai	0		#DIV/0!
Jumlah	12.856.850.444	11.037.560.004	16,48

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp3.956.872.667,-

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.956.872.667,- dan Rp2.619.438.825,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.616.007.712	1.508.064.777	#REF!
Beban Persediaan Bahan Baku	1.119.644.315	893.571.643	#REF!
Beban Persediaan Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	0		
Beban barang persediaan lainnya untuk di jual/diserahkan kpd masyarakat	0		
Beban Persediaan Lainnya	221.220.640	217.802.405	#REF!
Jumlah Beban Persediaan	3.956.872.667	2.619.438.825	51,06

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp6.442.943.945,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.442.943.945,- dan Rp6.571.050.668,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.890.525.335	2.427.713.130	#REF!
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-2.366.000		
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	57.317.000	86.385.000	#REF!
Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-28.955.000		
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	796.700	1.472.900	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	85.680.000	98.592.000	#REF!
Beban Bahan	1.021.370.910	655.945.512	#REF!
Beban Honor Output Kegiatan	740.885.000	612.960.000	#REF!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	416.503.576	#REF!
Beban Langganan Listrik	2.092.545.231	1.885.244.588	#REF!
Beban Langganan Telepon	45.268.234	44.312.394	#REF!
Beban Langganan Air	0	0	#REF!
Beban langganan daya dan jasa lainnya	23.439.974	18.237.268	0,00
Beban Sewa	158.690.000	97.119.500	
Beban Jasa Profesi	52.600.000	40.500.000	#REF!
Beban Jasa Lainnya	305.146.561	186.064.800	#REF!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan & Mesin		0	2.970.000
Jumlah	6.442.943.945	6.571.050.668	-1,95

Beban
Pemeliharaan
Rp2.378.062.942,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.378.062.942,- dan Rp2.077.656.342,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	887.711.004	840.300.680	5,64
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	849.191.938	820.189.903	3,54
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.690.000	17.999.103	185,75
Beban pemeliharaan jalan dan jembatan	631.470.000	199.300.056	
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	199.866.600	0,00
Beban persediaan suku cadang			
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	2.378.062.942	2.077.656.342	14,46

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.526.892.421,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.526.892.421,- dan Rp1.932.079.697,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.474.722.421	1.683.819.697	-12,42
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-1.780.000		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.850.000	22.750.000	-47,91
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-400.000		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	175.510.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	42.500.000	50.000.000	-15,00
Jumlah	1.526.892.421	1.932.079.697	-20,97

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp8.594.666.798,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.594.666.798,- dan Rp14.500.167.024,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.560.343.668	1.687.110.500	0,00
Beban persediaan aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	0	0	
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	6.034.323.130	12.813.056.524	0,00
Jumlah	8.594.666.798	14.500.167.024	-40,73

Beban Bantuan Sosial
Rp 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat beban sosial pada Satker BBPBL Lampung.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.130.279.784,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Semester II /Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.130.279.784,- dan Rp4.483.889.806,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.425.938.054	3.081.219.280	#REF!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	604.962.407	1.194.156.832	#REF!
Beban Penyusutan Jalan dan jembatan	30.467.093	41.004.181	#REF!
Beban Penyusutan Irigasi	19.734.283	43.793.493	#REF!
Beban Penyusutan jaringan	24.117.406	48.234.814	#REF!
Beban Penyusutan Aset Tetap Yg tidak digunakan dalam pemerintahan	25.060.541	75.481.206	0,00
Jumlah Penyusutan	2.130.279.784	4.483.889.806	-52,49

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode Semester II tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan piutang PNB	0	0	#DIV/0!
Jumlah	-	-	-

Beban Lain-lain Rp 0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp2.585.267.245,-)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian kegiatan non operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	-25.103.000	40.756.178	-161,59
Beban pelepasan aset non lancar	-5.632.386.699	19.634.207.883	-128,69
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	-8.192.550.944	19.890.377.018	-141,19
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	370.157.400	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Surplus/defisit dari kegiatan lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0	0	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	
Surplus defisit pelepasan dari kegiatan non opera	2.585.267.245	-73.708.087	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	33.809.268.653	41.812.413.017	-19,14

Pos Luar Biasa
Rp0,-

D.13. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Ekuitas Awal

Rp49.405.625.350,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp49.405.625.350,- dan Rp52.793.768.090,-

Defisit LO

Rp.(33.809.268.653,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(33.809.268.653,-) dan Rp(41.812.413.017,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode Semester II / Tahunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp,- dan Rp477.579.586,-. Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

JENIS KOREKSI	NILAI KOREKSI
	765.385.798
Jumlah	

Laporan Keuangan Tahunan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung TA 2024

Koreksi atas
reklasifikasi Rp0,-

E.3.2.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi pada akhir periode 31 Desember 2024 sebesar Rp0,- dan untuk akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp0,-.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode Semester II tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp765.385.798,-)

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode per 31 Desember 2024 dan akhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp765.385.798,- dan Rp477.579.586,-.

Koreksi tersebut berasal dari selisih nilai penyusutan akibat transaksi reklasifikasi /perubahan kodefikasi barang dari Gedung bangunan menjadi peralatan dan mesin (massa manfaat). Terdapat koreksi Aset tetap non revaluasi senilai Rp765.385.586,- yang berasal dari koreksi penyusutan yang berasal dari penghentian asset dari penggunaan , dari koreksi pencatatan nilai bertambah dan berkurang (koreksi penyusutan).

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi penyusutan penghentian asset dari penggunaan	765.385.586
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp(0)

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
-	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.085.203.096,- dan Rp38.901.849.863,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	33.413.962.746
Diterima Dari Entitas Lain	1.320.350.650
Transfer Keluar	8.409.000
Transfer Masuk	-
Jumlah	32.085.203.096

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode per 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(1.320.350.650,-) sedangkan DKEL sebesar Rp33.413.962.746,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA- BUN. Terdapat Transfer keluar pada periode per 31 Desember 2024 senilai Rp8.409.000,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan

pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

E.

E.7 Ekuitas akhir

Nilai Ekuitas pada akhir periode 31 Desember 2024 dan akhir tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp48.213.131.022,- dan Rp49.405.625.350,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Satuan Kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dalam melaksanakan kegiatan mengacu pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 nomor: SP DIPA-032.04.2.427706/2023 tanggal 24 November 2023. Selama periode per 31 Desember 2024 telah terjadi revisi POK dan DIPA sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu :
- Revisi I yaitu pada tanggal 25 Januari 2024 yaitu revisi POK dengan nilai pagu yang masih sama dengan pagu anggaran awal ;
- Revisi II (kedua) yaitu tanggal 21 Februari 2024 yaitu revisi POK dengan anggaran yang masih sama dengan revisi sebelumnya ;
- Revisi DIPA ke III (ketiga) yaitu tanggal 04 Maret 2024 dengan anggaran yang telah direvisi menjadi Rp33.818.006.000,- ,
- Revisi ke IV (keempat) yaitu tanggal 23 April 2024 yaitu revisi POK dengan nilai pagu yang sama dengan revisi ke III ;
- Revisi ke V (kelima) tanggal 02 Mei 2024 yaitu revisi buka blokir / revisi POK dengan nilai pagu sama dengan revisi ke IV ;
- Revisi ke VI (keenam) yaitu revisi POK tanggal 05 Juni 2024 dengan nilai Pagu menjadi masih sama dengan revisi sebelumnya.
- Revisi ke VIII (delapan) yaitu revisi DIPA Kanwil tanggal 02 Agustus 2024 dengan nilai Pagu anggaran yang berubah menjadi sebesar Rp33.489.411.000,0
- Revisi ke IX (Sembilan) yaitu revisi POK tanggal 14 Oktober 2024 dengan nilai pagu yang sama dengan sebelumnya.
- Revisi ke X (sepuluh) yaitu revisi POK tanggal 19 November 2024 dengan nilai pagu yang masih sama dengan sebelumnya.

- Revisi ke XI (sebelas) yaitu revisi POK tanggal 25 November 2024 dengan nilai pagu yang masih sama dengan sebelumnya.
- Revisi ke XII (dua belas) yaitu revisi POK tanggal 09 Desember 2024 dengan nilai pagu yang masih sama dengan sebelumnya.
- Revisi ke XIII (tiga belas) yaitu revisi POK tanggal 12 Desember 2024 dengan nilai pagu yang masih sama dengan sebelumnya

2. Pada Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung terdapat program Nasional (PN) sebesar Rp22.029.912.000,- yang terdiri dari :

- Program pengelolaan perikanan dan kelautan,-
 - Bibit rumput laut dan kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat sebanyak 4.000 unit senilai Rp152.000.000,-
 - Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat sebanyak 10 paket senilai Rp550.000.000,-
 - Calon induk unggul ikan laut yang di salurkan ke masyarakat sebanyak 32.000 ekor senilai 9.810.000.000
 - Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat senilai Rp3.674.016.000,-
 - Sarana Bidang kemaritiman , kelautan dan perikanan
 - Calon induk unggul yang di produksi senilai Rp1.150.481.000,-
 - Penyidikan dan Pengujian Penyakit
 - Sampel surveilen resistensi antimikroba yang di uji senilai Rp52.383.000,-
 - Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang di sediakan senilai Rp100.000.000,-
 - Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat senilai Rp5.745.000.000,-
 - Pakan ikan yang di produksi untuk operasional UPT senilai Rp796.032.000,-

- Pada Tahun Anggaran 2024 ini, Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung mendapatkan pagu blokir senilai Rp66.794.000,- atau sebesar 0,199 %.

4. Terdapat asset Barang Milik Negara yang dilelang dan masuk ke dalam pendapatan pemindahtanganan BMN senilai Rp25.103.000,- yaitu berupa 1 unit mobil merk Toyota Kijang Grand Long dan 2 kendaraan roda tiga merk Viar dengan nomor Risalah Lelang Nomor 160/05.02/2024-01 tanggal 22 Februari 2024.

5. Terdapat perbedaan antara pendapatan LO (Laporan operasional) dengan pendapatan di LRA (Laporan Realisasi Anggaran) senilai Rp62.132.116,- perbedaan tersebut berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp19.913.905,- , penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp17.115.145,0 dan pendapatan pemindahtanganan BMN senilai Rp25.103.000,-

6. Pada Periode Semester II 2024 terdapat beban persediaan senilai Rp3.956.872.667,- yang berupa :

- Beban persediaan konsumsi senilai Rp2.616.007.712,-
- Beban Persediaan bahan baku senilai Rp1.119.644.315,-
- Beban persediaan lainnya senilai Rp221.220.640,-

7. Terdapat penerimaan kembali belanja barang TAYL senilai Rp17.115.145,-

Penerimaan tersebut berasal dari :

- penyetoran Pendapatan pengembalian Belanja Barang TAYL TL Audit Kinerja TA 2023-2024 No.T.280/ITJ/HP.110/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dengan nomor NTPN DCB151JNFVF0R062 senilai Rp5.796.800,- berupa Pekerjaan pemeliharaan Instalasi Way Muli dan Guest House atas nama CV.Bledug Barokah.

- Penyetoran pendapatn pengembalian Belanja barang TAYL TL Audit Kinerja TA 2023-2024 No.T.280/ITJ/HP.110/IX/2024 tanggal 09 September 2024 dengan nomor NTPN ICECB7QLUPFNM1C7 senilai Rp4.619.500,- berupa pekerjaan peerbaikan sarana modul Kerapu atas nama CV.ELANG PUTRA CAKRA BUANA.

- Penyetoran pendapatan pengembalian belanja TAYL TL Audit Kinerja TA 2023-2024 No.T.280/ITJ/HP.110/IX/2024 tanggal 09 September 2024 dengan nomor NTPN D222B1155DF9QMAI9R senilai Rp6.698.845,- berupa pekerjaan perbaikan Auditorium atas nama CV.ARYA MANDIRI.

8. Setoran sisa GUP/TUP telah di setor ke kas negara senilai Rp196.431.321,- di setor pada tanggal 19 Desember 2024 dengan kode NTPN.5A9E46QT9MB9RB1M

9. Terdapat Utang pada pihak ketiga yaitu adalah berupa tagihan listrik PLN bulan Desember 2024 senilai Rp182.254.569,- dan belanja pegawai yang masih harus di bayar berupa uang makan PNS dan PPPK bulan Desember 2024 sebesar Rp51.560.000,- .

10. Terdapat perbedaan antara pendapatan LO (Laporan operasional) dengan pendapatan di LRA (Laporan Realisasi Anggaran) senilai Rp50.272.122,- perbedaan tersebut berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp6.911.888,- , penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar Rp2.604.056,dan pendapatan pemindahtanganan BMN senilai Rp.40.756.178,-

11. Terdapat belanja resiprokal pada semester tahun ini yaitu berupa penyetoran Jasa Sertifikasi SDM Kearsipan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 an Budi Sasongko, A.Md senilai Rp1.700.000,- dengan nomor SP2D 240171302006808 tanggal 23 Oktober 2024.

12. Capaian output pada tahun 2024 Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung sebesar 100 % sebagaimana table terlampir :

REKAP KERTAS KERJA CAPAIAN OUTPUT

periode : DESEMBER

No	Kanwil DJPB	KPPN	Kode BAES1 Satker	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			Validasi Capaian Output			% Data Masuk/Upload	Jumlah Kiriman Data Sakti	DIPA Revisi Ke (Sakti)	Tanggal Pertama Kirim Sakti	Terakhir Posting OMSPAN	Action	Periode Upload Data	
							Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah	Data Valid	Data Tidak Valid	Jumlah								
1	K07	017	03204.427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	13	25	25	0	25	25	0	25	100.00	5	13	03-01-2025 09:18:15	06-01-2025 15:18:33	Closed		
Total						25	25	0	25	25	0	25	100.00							

12. Berdasarkan Keputusan Kepala BBPBL Lampung dengan Nomor: 0057/BBPBL/OT.213.K/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Mulyanto, S.T,M.Si
 Pejabat Pembuat Komitmen : Sunaryat, SP.
 Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Eko Priyanto, SP. MM.
 Bendahara Pengeluaran : Yohana Florensia Corne

